

BAB II

Gambaran Umum

Dalam bab ini memaparkan gambaran umum tentang Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penjelasan ini berisikan tentang, Sejarah berdirinya Organisasi Alkhairaat, keterlibatan Alkhairaat dalam Perpolitikan di Kota Palu, serta potensi dan bentuk kerja sama antara Alkhairaat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lebih khususnya Kota Palu.

2.1 Sejarah berdirinya Alkhairaat

Sejarah berdirinya Alkhairaat tidak terlepas dari histori hijranya ulama Asal Kota Hadramut salah satu kota di Negara Yaman yaitu Al Habib Idrus Bin Salim Al Jufrie atau sering disapa Guru Tua, kedatangan dan kehadiran guru tua di Indonesia pertama kali pada tahun 1911 dan kemudian kedatangan yang kedua pada tahun 1922. Pada kedatangan yang kedua, sangat erat keterkaitannya dengan sikap perlawanannya terhadap kolonial Inggris yang melakukan penjajahan terhadap tanah kelahirannya Hadramaut.

Bentuk perlawanan yang dilakukan Sayyid Idrus bin Salim Aljufrie ialah melakukan perlawanan intelektual dengan cara diplomasi melalui Liga Arab, dengan harapan problem yang ada di Hadramaut dapat di agendakan di forum Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun gerakan diplomasi yang dilakukan tersebut suda terpantau oleh Kolonial Inggris yang mengakibatkan Guru tua di tangkap dan di asingkan ke Asia Tenggara tepatnya di Indonesia. Maka ketika berada di Palu,

Sayyid Idrus, menyadari bahwa daerah ini pernah mengalami 4 rezim pemerintahan, yaitu Belanda, Jepang, sekutu dan Republik Indonesia.

Ketiga masa Imperialisme ini, tidak hanya menjajah secara fisik, tetapi juga merusak mentalitas dan moralitas masyarakat Palu secara keseluruhan. Hal itulah yang membuat api perlawanan di hati Sayyid Idrus kembali membara ketika melihat kezaliman ketiga imperialisme tersebut terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia.

Pada awal tahun 1930 Sayyid Idrus kemudian mendirikan madrasah yang kemudian menjadi Organisasi. Secara umum lahirnya Alkhairaat dalam rangka merespon kondisi sosio-politik umat Islam terhadap kebijakan pemerintahan kolonialisme yang tidak hanya melakukan penjajahan namun juga melakukan kristenisasi.

Nama Alkhairaat diambil dari Asal kalimat yang berasal dari Al-Qur'an yaitu Al-kayrat yang berarti Kebaikan (Muhaimin & Wahab, 2014). Menurut pendiri Guru Tua kata Alkhairaat itu adalah sebuah nama yang penuh berkah yang dengan hidayah dan taufiq dari Allah SWT, kata Alkhairaat disebutkan dalam Al-Qur'an di 9 ayat pada 7 surah yaitu ; Q.S Ali Imran (3) : 114, Q.S Al-Baqarah (2) 148, Q.S Al-Maidah (5) : 48, Q.S At-Taubah (9) : 88, Q.S Al-Anbiyah (21) : 73 dan 90, Q.S Al-Mu'minun (23) : 56 dan 61, Q.S Fathir (35) : 32.

Alkhairaat sendiri berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan didirikan pada tahun 1930 M / 1349 H. Organisasi Alkhairaat menjadi tonggak pendidikan Islam di Sulawesi tengah. Selanjutnya dalam waktu yang relatif singkat, cabang- cabangnya telah berkembang di kawasan Timur Indonesia. Kehadiran

Alkhairaat sendiri bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengarahkan dan memberi petunjuk untuk umat manusia, dengan harapan dapat terhindar dari kebodohan dan kesesatan. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Pada tahun 1933 M Alkhairaat menamatkan 2 orang siswanya lalu diangkat menjadi Guru dan ditahun 1934 M Alkhairaat telah menamatkan 33 siswanya yang seluruhnya diangkat menjadi guru dan ditempatkan ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Begitu seterusnya Alkhairaat melahirkan Ustadz dan Ustadzah yang kemudian disebarkan ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya.

2.1.1 Alkhairaat Sebelum kemerdekaan Indonesia

Pada periode ini, Alkhairaat yang dipimpin oleh Guru Tua tetap melakukan aktivitasnya yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat, melalui pendidikan dan dakwah. Cara ini dilakukan dikarenakan masyarakat masih membutuhkannya. Aktivitas Alkhairaat tidak hanya terbatas di Palu saja, tetapi sudah meluas ke daerah lain seperti Parigi, Poso, Ampana, Tinombo, Luwuk, Banggai, Gorontalo, Manado dan Ternate untuk kawasan Indonesia Timur serta juga daerah lain meliputi Kalimantan dan Jawa.

Pada tahun 1933 M pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan siswa-siswa Alkhairaat untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Hal tersebut langsung spontan direspon oleh siswa-siswa Alkhairaat yang jumlahnya ratusan orang dengan melakukan

demonstrasi di kantor pajak pemerintahan kolonial dengan tuntutan pembatalan SK tersebut. Pemerintah kolonial langsung membatalkan surat keputusan tersebut, karena pemerintahan kolonial khawatir akan meluasnya demonstrasi.

Pada tahun itu juga (1933) Raja Kerajaan Biromaru memberikan mandat kepada Sayyid Idrus (Guru Tua) selaku pendiri sekaligus ketua pada saat itu sebagai Mufti yang memutuskan dan menentukan hukum sesuai ajaran Islam di kerajaanya. Pengaruh Alkhairaat telah memasuki daerah pedesaan di pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan Jawa. Besarnya peranan Alkhairaat dikalangan masyarakat pedesaan membawa dampak tidak menyenangkan bagi kolonial Belanda dan dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat agar berani untuk menentang kekuasaan penjajahan Belanda.

Pada masa tersebut Belanda sudah mulai curiga terhadap kegiatan Alkhairaat di masyarakat, selain itu kelahiran Alkhairaat dianggap sebagai saingan dari Zending yang merupakan salah satu kelompok yang bergerak melakukan Kristenisasi yang di sponsori oleh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1939, secara mendadak Belanda mengirimkan Inspektur Pendidikan dan pengajaran ke Palu untuk menginspeksi kurikulum di perguruan Alkhairaat, yang mana Alkhairaat didalam pembelajarannya merujuk pada buku pelajaran "*Izhatun Nasyi'in*" karangan Syekh Mushthafa Alghilayini dari Lebanon yang membahas tentang sejarah peranan agama dalam Perjuangan. Setelah peristiwa tersebut, Pengawasan terhadap Alkhairaat semakin diperketat. Ditambah lagi beberapa orang jebolan Alkhairaat menjadi anggota dan pengurus organisasi Serikat Islam di Palu. Hal tersebut membuat Pemerintah Kolonial Belanda semakin takut dikarenakan tujuan utama

dari pergerakan tersebut adalah untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Kolonial Belanda berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghambat pergerakan tersebut. Ditahun itu juga Pemerintah Belanda menangkap M.S Patimbang karena mengadakan rapat gelap di kampung Soho Luwuk pada saat bertugas sebagai guru Alkhairaat di Ampana- Poso, M.S patimbang ditahan dan mesjid dilarang untuk kegiatan apapun termasuk shalat Jum'at.

Pada tanggal 8 Desember 1941 M pecah Perang Pasifik, Satu bulan setelahnya pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang menduduki Manado dan menjadikanya pangkalan Angkatan Laut Jepang di kawasan Indonesia Timur. Tidak lama berselang sesudah pendudukan tentara Jepang di Manado, Jepang menduduki Palu dan memerintahkan untuk menutup perguruan Alkhairaat yang berlangsung selama tiga setengah tahun, yaitu selama masa pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, Sayyid Idrus dan para pengikutnya tidak berpangku tangan dan menyerah begitu saja, proses belajar-mengajar tetap dilaksanakan namun dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari dengan menggunakan pencahayaan seadanya yaitu lampu pelita. Proses belajar- mengajar tersebut berlangsung selama pendudukan Jepang, yaitu 3,5 tahun lamanya.

2.1.2 Alkhairaat setelah kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mendengar berita tersebut pada waktu

yang sama Sayyid Idrus langsung mengeluarkan instruksi kepada murid-muridnya untuk memulai kembali proses belajar dan mengajar di Alkhairaat. Namun setelah proklamasi tersebut Indonesia tidak sepenuhnya merdeka dikarenakan ditahun yang sama tentara NICA menguasai beberapa wilayah di Indonesia termasuk Palu. Di masa ini banyak tokoh-tokoh Alkhairaat terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. Ada kelompok yang terlibat secara terang-terangan dan ada pula yang bekerja dibawah tanah. Dalam gerakan Gerilya Kilat, ada beberapa Abnaul Khairaat yang terlibat sebagai anggotanya seperti Bahren Thayeb, Hasbullah Arsyad, H Asnawi dan lain-lain.

Gerakan ini mempunyai Misi utama yaitu memberi informasi kepada kelompok pergerakan. Untuk mematahkan aktivitas pergerakan tentara NICA mengadakan penangkapan-penangkapan kepada mereka yang dicurigai tanpa proses penyelidikan dan pengadilan, orang-orang yang ditangkap langsung dijadikan tahanan.

Pada tahun 1950 keamanan di Palu tidak stabil karena gangguan keamanan dari gerombolan Kahar Muzakar yang daerah operasinya meliputi Lembah Palu. Keadaan Kota Palu pada saat itu tidak aman lagi karena banyak gerombolan Kahar Muzakar yang berkeliaran dalam kota dengan menyamar sebagai perempuan. Hal itu sulit diketahui karena mereka berkeliaran di malam hari dan jumlah tentara dan polisi pada saat itu masih belum banyak. Pada masa itu banyak tokoh Alkhairaat yang dicurigai berkerja sama dengan kelompok gerombolan, sehingga tidak sedikit orang-orang Alkhairaat yang di interogasi oleh petugas. Namun isu itu hanyalah tipu daya NICA untuk menghambat kegiatan Alkhairaat. Pada tanggal 16 Mei 1950

Alkhairaat mengeluarkan Maklumat yang isinya menentang setiap ancaman yang merongrong pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Selain itu Alkhairaat juga memiliki peranan dalam menumpas gerakan pemberontakan G30S-PKI dan Premesta. Hal ini dibuktikan dengan Guru tua yang merupakan pendiri Alkhairaat yang sekaligus menjabat sebagai ketua utama Alkhairaat pada waktu itu tidak membuka ruang sedikitpun terhadap keberadaan PKI dengan cara meliburkan Universitas Islam Alkhairaat (UNISA), kemudian mengirim para mahasiswanya ke berbagai daerah pedalaman di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia bagian Timur untuk membendung pengaruh PKI (Muhaimin & Wahab, 2014).

2.2 Struktur Kepemimpinan Masyarakat Kota Palu

Pada tahun 1930 awal mula berindia pondasi organisasi Alkhairaat yang dibangun oleh sayyid idrus bin salim Aljufrie (guru tua), Guru tua merupakan ulama yang berasal dari Hadramaut (Yaman Selatan). Kedatangan serta didirikannya Alkhairaat tersebut membawa banyak perubahan dan pembaharuan dibidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dengan melakukan terobosan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat secara signifikan tersebut sehingga dalam kurun waktu 39 tahun Alkhairaat mampu memperluas penyebarannya diberbagai daerah di Sulawesi Tengah dan sekitarnya dengan membangun sekolah madrasah sebanyak 420 buah. Madrasah-madrasah tersebut sebahagian berada di Palu dan sekitarnya serta sulawesi tengah pada umumnya. Sebagian lagi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, sulawesi selatan,

Irian Jaya, Maluku dan Kalimantan Timur. Itulah alasan mengapa masyarakat Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada Sayyid Idrus yang menjadikan nama pendiri Alkhairaat tersebut sebagai nama Bandara Udara di kota palu.

Selain itu dari pada itu, Struktur kepemimpinan masyarakat Sulawesi tengah khususnya di kota Palu secara garis besar sama dengan masyarakat yang berada pada perkotaan yang memiliki masyarakat yang agamis seperti di Jawa Timur. Mereka memiliki prinsip Samina wa'athona dalam hierarkhi kepatuhan dalam budaya kehidupannya. Prinsip ini hingga saat ini masih melekat kuat pada masyarakat Kota Palu Khususnya para Abnaul Khairaat. Hal ini tidak terlepas dari ajaran agama islam yang sudah melekat bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu.

Konsep prinsip Samina Wa'athona yaitu mendengarkan perintah dan mematuhiya bukanlah hal yang asing dalam kehidupan masyarakat muslim pada umumnya. Prinsip Samina Wa'athona merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Prinsip ini dihasilkan oleh dan sekaligus menghasilkan kehidupan sosial, sehingga prinsip tersebut menjadi kekuatan yang menstruktur kehidupan sosial (structuring structure), sekaligus pula sebagai kekuatan yang distrukturisasi oleh kehidupan sosial (structured structure).

Masyarakat kota Palu, terutama pada masyarakat muslimnya yang menganggap Habaib atau Habib sebagai pemimpin di dunia sekaligus akhirat atau dengan kata lain sebagai penerus baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi wakil Tuhan di

muka Bumi. Selain itu gelar Habib itu sendiri hanya bisa disandangkan kepada para keturunan Nabi Muhammad Saw melalui cucunya yaitu Sayyidina Hasan Bin Ali. Identitas Habib di Indonesia, sebagai tokoh agama yang memiliki nasab langsung ke Nabi Muhammad SAW telah diakui dan mereka juga memainkan peran penting sejak masa kolonial hingga hari ini (Alkatiri & Karim Hayaze, 2022). Oleh karena sebab itu, gelar Habib bagi masyarakat Muslim Kota Palu tidak hanya diberikan kepada Dzuriyah nabi yang memiliki pondok Pesantren saja, tapi biasa juga diletakan kepada tokoh Dzuriyah yang memiliki Kharismatik serta selalu mengajarkan dan menyebarkan ilmu-ilmu agama melalui pengembaraan ke desa-desa yang selain tempat asalnya.

Kharisma Habib memperoleh dukungan masyarakat karena dipandang memiliki kemapanan moral, dan kualitas iman yang melahirkan daya tarik bagi pengikutnya. Dengan kharismanya, seorang Habib tidak hanya tergolongkan sebagai elit agama, akan tetapi sebagai elit pesantren dan sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi di dalam penyebaran ilmu-ilmu keagamaan islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinannya.

Kondisi sosial-kultural tersebut tidak terlepas dari pengaruh Sayyid Idrus Bin Salim Aljufrie (Guru Tua) yang merupakan pendiri dari Alkhairaat yang juga merupakan Habib atau Dzuriyah Nabi Muhammad SAW. Alkhairaat mendapatkan tempat dihati masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu, Hal ini dikarenakan peran Habib Idrus selaku pendiri Alkhairaat menjadikan lembaga tersebut sebagai sarana dakwah dan pendidikan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Selain dari pada itu yang menjadikan Alkhairaat berbeda terhadap Organisasi Masyarakat Islam lainnya seperti Nadhlatul Ulama, Muhammdiyah dan LDII adalah proses pemilihan pemipinya. Jabatan pimpinan Alkhairaat hanya bisa didapatkan oleh Dzuriyah atau keturunan dari Habib Idrus (Guru tua), lalu diantara beberapa keturunan Habib Idrus tersebut dipilih melalui musyawarah Nasional Pengurus Besar Alkhairaat.

Berdasarkan kondisi sosial-kultural serta gelar Habib yang disandangkan kepada keturunan Habib Idrus (Guru tua) tersebut, maka tidak mengheran jika mereka dijadikan elit lokal di Sulawesi Tengah yang memiliki peran terhadap perpolitikan lokal. Peran elit lokal didalam perpolitikan dilakukan untuk mempengaruhi situasi kondisi politik yang diinginkan. Hal tersebut sejalan dengan konsep Elit dan kekuasaan didalam buku karangan (Mas'ood, 2006) yang dikemukakan robert dahl yaitu : pertama kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan yang kedua kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Singkatnya bahwa seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, yang berarti bahwa orang yang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang yang pertama, dan orang yang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua tidak bisa memilih sendiri tindakan lain.

Bila kita berbicara tentang kekuasaan politik yang dimiliki oleh para ulama atau habib di kota Palu yang sebenarnya terbayang adalah bukan hanya sekedar mereka memiliki kemampuan untuk merubah perilaku individu-individu akan tetapi

melainkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan tentang dakwah dan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan.

2.3 Struktur dan Fungsi Pengurus Besar Al-Khairaat

Dengan memahami lebih dalam pengaruh elit Alkhairaat dalam politik praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan dalam merinci dinamika politik dan hubungan agama-politik di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pengurus Besar Alkhairaat merupakan lembaga yang berpusat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Besar Alkhairaat:

1. Memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan perhimpunan Alkhairaat Pusat
2. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan program kerja Alkhairaat
3. Mengangkat dan memberhentikan Komisariat Wilayah (Komwil)
4. Mengangkat dan memberhentikan Komisariat Daerah (Komda) atas usul
 1. Komisariat Wilayah (Komwil)
5. Menetapkan berdirinya Badan Otonom dan Lembaga atas persetujuan Ketua
 2. Utama Alkhairaat Mengatur tata hubungan kerja perhimpunan Alkhairaat
 3. Melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan kekayaan perhimpunan
 4. Mengatur hubungan politik organisasi dan kemasyarakatan di lingkungan

5. perhimpunan Alkhairaat.

Susunan Pengurus Besar Alkhairaat:

- Ketua Umum Alkhairaat : H.S. Ali Aljufrie, MA.
- Sekretaris Jendral : DR. Lukman S Taher, MA.
- Bendahara Umum :

Majelis-Majelis PB Alkhairaat

- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Majelis Pendidikan Tinggi
- Majelis Hubungan Luar Negeri
- Majelis Peranan Wanita
- Majelis Dakwah dan Pembinaan Umat
- Majelis Hukum dan Wakaf
- Majelis Ekonomi
- Majelis Pembangunan

2.4 Keterlibatan Alkhairaat pada politik praktis

Pada poin ini penulis menjelaskan tentang keterlibatan Alkhairaat dan elit Alkhairaat pada politik praktis di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam

pertarungan politik segala bentuk kekuatan politik selain partai politik seperti organisasi masyarakat atau LSM sebisa mungkin harus bisa dirangkul karena memiliki basis massa yang cukup militan. Selain dari pada itu Schattscheider juga berpendapat bahwa partai-partai sebagai penggerak mayoritas memiliki klaim atas publik yang lebih sah dan lebih tinggi dari pada yang di tegaskan oleh kelompok penekan/ interst group yang hanya bisa memobilisasi minoritas.

Pada Pemilu maupun dalam pilkada ormas memiliki daya pikat yang luar biasa, hal itu dikarenakan ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh berpengaruh dan struktur organisasi hingga ke pelosok desa/kelurahan, terlebih dari itu ormas-ormas besar seperti NU , Muhammadiyah dan Alkhairaat jelas memiliki anggota yang sangat banyak. Itu berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi para kontestan Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu tidak heran jika para politisi lokal Sulawesi Tengah berusaha ingin meraih dukungan dari Alkhairaat.

Keberadaan dan kehadiran Alkhairaat mengakibatkan perubahan situasi keislaman kalangan masyarakat Sulawesi Tengah (Ishak & Agustiyara, 2017). Organisasi masyarakat (Ormas) Islam lainnya seperti Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang kuat dalam aspek pendidikan dan sosial. Meski demikian, Alkhairaat memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, khususnya di Indonesia bagian timur. Pengaruh Alkhairaat dapat dilihat dari banyaknya kontribusi dan aset Alkhairaat dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Jumlah Aset Alkhairaat sekarang kurang lebih dari seratus ribu aset. Terdiri

dari 1585 aset Madrasah, 88 Pondok pesantren, 1 Universitas, 1 rumah sakit, 1 koran dan 2 stasiun radio (Ishak & Agustiyara, 2017).

Pengaruh signifikan yang dilakukan atau diakibatkan Alkhairaat menjadikan daya tarik yang kuat bagi mereka yang ingin mendapatkan dukungan yang kuat dari salah satu ormas islam terbesar ke tiga di Indonesia yaitu Alkhairaat. Yang dimaksud dalam hal ini, norma yang muncul sebagai daya tarik adalah dalam konteks pertarungan politik pilkada maupun pemilihan umum.

Selain itu Alkhairaat adalah merupakan salah satu organisasi masyarakat tertua di Indonesia dan juga tergolong organisasi masyarakat yang masih produktif. Dengan usia yang cukup tua dan produktif tentunya Alkhairaat suda banyak mencetak kader-kader berkualitas yang menjadi elit politik di nasional maupun di daerah. Di Sulawesi Tengah ada beberapa tokoh yang menjadi kepala daerah yang merupakan Abnaul Khairaat. Dengan berdasarkan fakta tersebut tak heran jika Alkhairaat dijadikan salah satu kekuatan politik di Sulawesi Tengah dan Kota Palu pada khususnya.

Pada Pemilu tahun 2019 Alkhairaat dijadikan salah satu agenda wajib untuk di kunjungan oleh para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden karena mengingat Alkhairaat adalah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bagian Timur. Hal tersebut bertujuan untuk demi mengamankan dukungan masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur.

Gambar 2.1



Sumber : Media Online MEDIA ALKHAIRAAT 19 Januari 2019

Gambar 2.2



Sumber : Media Online ANTARA.COM 15 Juni 2019

Meskipun di dalam AD/ART Pengurus besar Alkhairaat maupun Organisasi sayap yang di bawah naungan Alkhairaat seperti Wanita Islam Alkhairaat (WIA) dan Himpunan pemuda Alkhairaat (HPA) secara jelas menyatakan Alkhairaat tidak dibolehkan untuk terlibat dengan politik praktis serta pernyataan

tegas yang dilontarkan oleh Ketua Umum PB Alkhairaat yaitu Habib Ali Al Jufrie pada kegiatan muktamar, hal yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Utama PB Alkhairaat yang baru yaitu Habib Alwi Al Jufrie yang menegaskan Alkhairaat tidak menempatkan diri dalam mendukung salah satu partai politik dan juga kandidat Calon kepala Daerah apalagi mencatut atau menggunakan nama dan foto Ketua Utama PB Alkhairaat.

Ketidak berpihakan menurut Habib Alwi bin Saggaf Aljufrie bertujuan untuk menjaga kestabilan politik, karena Alkhairaat bukan hanya milik satu golongan tertentu akan tetapi miliki seluruh umat Islam yang ada di Indonesia Khususnya di Sulawesi Tengah. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Habib Hasan Al Habsy yang merupakan salah satu Elit di Alkhairaat, menurutnya sebaiknya Alkhairaat secara kelembagaan tidak bersentuan dengan kegiatan politik, apalagi yang namanya politik praktis.

Namun ada saja dari Elit atau tokoh yang ada di Alkhairaat mencoba menggiring Alkhairaat kerana Politik Praktis. Seperti pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 serta pada pemilihan Walikota Palu tahun 2019. Pada pemilu pada 2015, Alkhairaat memberikan dukungan kepada pasangan Rusdy Mastura dan Ihwan Datu Adam dengan cara mengeluarkan surat maklumat bernomor Istimewa/KUT.A2015, yang ditandatangani oleh ketua utama Alkhairaat pada masa itu yaitu H.S Saggaf Aljufrie. Dengan dikeluarkannya surat maklumat tersebut mengakibatkan disintegrasi diantara pengurus PB Alkhairaat, antara Ketua Utama dan Ketua Umum, alasan Ketua umum beserta beberapa elit Alkhairaat lainya tidak menghendaki maklumat tersebut adalah dikarenakan

bertentangan dengan AD/ART PB Alkhairaat. Berdasarkan fenomena tersebut demi menjaga Netralitas beberapa tokoh elit Alkhairaat berinisiatif untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Longki dan Sudarto yang sudah tentu merupakan lawan atau saingan dari Rusdy dan Ihwan. Selain menggunakan alasan demi menjaga netralitas, ternyata alasan lain dukungan yang diberikan kepada pasangan Longki dan Sudarto adalah karena beberapa Elit Alkhairaat memiliki kedekatan hubungan kekeluargaan/darah antara Alm Ince Ami Dg. Sute (istri Guru Tua) dan Longki Djanggola yang merupakan bangsawan kerajaan Palu.

Disisi lain Alkhairaat secara organisasi melalui maklumat yang dikeluarkan Oleh Ketua Utama Alkhairaat memberikan dukungan kepada mantan Wali Kota Palu yaitu Rusdy mastura dan Ihwan datu adam. Dukungan ini didapatkan melalui mufakat dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Organisasi Alkhairaat dan keputusan ini di umumkan kepada seluruh anggota dan Pengurus organisasi Alkhairaat. Beberapa alasan Alkhairaat memberi dukungan kepada Rusdy mastura ialah dikarenakan kinerja Rusdy mastura sewaktu menjabat sebagai wali kota Palu memberikan manfaat kepada Alkhairaat. Seperti menetapkan Nama Bandara Udara di Palu menggunakan Nama Guru Tua, menetapkan dan membangun wisata Islami di kawasan Alkhairaat serta memprioritaskan penyaluran APBD dari pemerintah untuk oprasional Alkhairaat.

Keterlibatan Alkhairaat pada perpolitikan lokal juga bisa dilihat dipemilihan walikota tahun 2019 dimana salah satu kandidat calon walikota yaitu Hadiano Rasyid memiliki hubungan kedekatan khusus dengan beberapa elit Alkhairaat, beberapa diantaranya yaitu Habib Ali Aljufrie selaku ketua umum PB Alkhairaat

pada saat itu dan juga Habib Sholeh Alidrus yang masyarakat Sulawesi Tengah menyebutnya (Habib Rotan) yang merupakan pimpinan pondok pesantren dan majelis Nurul Khairaat. Kedekatan tersebut bisa dilihat pada saat sebelum pemilihan Walikota 2019, Hadiano Rasyid sering bersilaturahmi ke rumah Habib Ali Aljufrie serta meminta do'a dan restu untuk menghadapi pertarungan pemilihan Wali Kota Palu tersebut. Selain itu Hadiano Rasyid juga memiliki kedekatan khusus kepada pimpinan pondok pesantren dan majelis Nurul Khairaat, kedekatan tersebut dapat dilihat dari kehadiran Hadiano Rasyid di setiap kegiatan Dzikir yang diselenggarakan oleh Majelis Nurul Khairaat setiap hari Jum'at (seminggu sekali). Adanya hubungan kedekatan tersebut dibenarkan oleh Hadiano Rasyid dalam sesi wawancara;

“Setiap politisi yang ada di Sulawesi Tengah terkhusus di Kota Palu sudah seharusnya membangun hubungan kedekatan dengan para elit di Alkhairaat (Habib Ali dan Habib Shole) karena mereka merupakan tokoh yang menjadi panutan masyarakat Sulawesi Tengah sehingga hubungan kedekatan tersebut bisa menjadi sebuah kekuatan dalam perhelatan pertarungan politik” (Wawancara dengan Hadiano Rasyid selaku Walikota Palu, 23 Oktober 2023).

Itulah yang menjadikan salah satu kunci kemenangan Hadiano Rasyid pada pemilihan Walikota Palu 2019 yang lalu. Dengan adanya hubungan khusus tersebut antara Hadiano Rasyid dengan Para Elit di Alkhairaat menjadikan basis massa yang dimiliki oleh masing-masing elit Alkhairaat tersebut memberikan dukungan kepada Hadiano Rasyid, karena dianggap memiliki kedekatan dengan Ulama dan juga pada pemilihan Walikota pada tahun 2019 Visi dan Misi yang digaungkan oleh

Hadianto Rasyid dianggap sejalan dengan tujuan serta keinginan para Ulama yaitu menciptakan masyarakat religius yang berlandaskan Agama Islam.